

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus atau Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS CoV-2) telah menyebar di berbagai negara seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) menetapkan situasi ini sebagai status Pandemi (WHO, 2020). Indonesia adalah salah satunya negara yang merasakan akibat dari pandemi ini. Virus ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 dengan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkonfirmasi positif Covid-19 (dilansir dari p2p.kemendes.go.id). Seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga banyak menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 berakibat di berbagai sektor, termasuk sosial ekonomi. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu contoh dampak pandemi ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) RI, pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,23% dan mengalami peningkatan sebesar 7,07% pada tahun 2020. Selain itu, angka kemiskinan di Indonesia juga meningkat di tahun 2019 sebesar 9,41 % dan tahun 2020 sebesar 9,78%.

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi akibat Pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dampak yang diakibatkan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin ini, selain tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, juga berpengaruh pula pada sektor perekonomian. Perekonomian di masa pandemi

adalah tantangan bagi seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Berikut adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Timur selama pandemi dan pasca pandemi.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pacitan	75.86	80.82	84.19	76.93	76.2
Ponorogo	83.97	86.74	89.94	81.8	83.71
Trenggalek	76.44	81.06	84.89	76.75	74.58
Tulungagung	70.01	76.4	78.59	70.52	68.81
Blitar	103.75	108.55	112.62	101.94	101.94
Kediri	163.95	179.93	184.49	169.46	171.18
Malang	246.6	265.56	276.58	252.88	251.36
Lumajang	98.88	102.6	105.25	95.04	93.82
Jember	226.57	247.99	257.09	232.73	236.46
Banyuwangi	121.37	130.37	130.93	122.01	119.52
Bondowoso	103.33	110.24	115.18	105.69	105.13
Situbondo	76.44	83.74	86.95	81.46	82.62
Probolinggo	207.22	218.35	223.32	203.23	205.02
Pasuruan	141.09	151.43	159.78	148.62	154.09
Sidoarjo	119.29	127.05	137.15	125.69	119.15
Mojokerto	108.81	118.8	120.54	111.03	112.86
Jombang	116.44	125.94	127.3	115.48	117.36
Nganjuk	118.51	122.73	125.53	113.63	115.86
Madiun	71.91	78.3	81.61	74.07	75.87
Magetan	60.43	65.09	67.75	62.65	62.49
Ngawi	119.43	128.19	130.81	119.02	121.3
Bojonegoro	154.64	161.1	166.52	153.4	153.25
Tuban	170.8	187.13	192.58	178.05	177.25
Lamongan	157.11	164.68	166.82	151.08	149.94
Gresik	148.61	164.05	166.35	149.64	149.75
Bangkalan	186.11	204	215.97	196.11	196.66
Sampang	202.21	224.74	237.23	217.97	221.71
Pamekasan	122.43	129.41	137.12	126.02	126.43
Sumenep	211.98	220.23	224.73	206.2	206.1
Kota Kediri	20.54	22.19	22.55	21.15	21.03
Kota Blitar	10.1	11.1	11.33	10.65	10.61
Kota Malang	35.39	38.77	40.62	38.56	37.78
Kota Probolinggo	16.37	17.72	17.91	16.16	15.86
Kota Pasuruan	12.92	13.4	13.97	13.02	13.56
Kota Mojokerto	6.63	8.09	8.37	7.88	7.65

Kota Madiun	7.69	8.83	9.06	8.49	8.46
Kota Surabaya	130.55	145.67	152.49	138.21	136.37
Kota Batu	7.89	8.12	8.63	8.05	7.1
Provinsi Jawa Timur	4112.25	4419.1	4572.73	4181.29	4188.81

Sumber : <https://jatim.bps.go.id> , diakses pada 6 Januari 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuatif berupa peningkatan dan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2019-2023. Perubahan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya, peningkatan total persoalan pasien positif Covid-19, tingginya pekerja yang terkena PHK, pemberlakuan pembatasan sosial, berkurangnya peluang lapangan pekerjaan dan inflasi umum (Fikri Amrullah et al., n.d.). Faktor tingginya pekerja yang terkena PHK tersebut dapat dipahami sebagai tingginya angka pengangguran di Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur terjadi peningkatan dari tahun 2019 sebesar 3,82 % sedangkan tahun 2020 sebesar 5,84%. Tetapi, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 5,74%, tahun 2022 sebesar 5,49% dan tahun 2023 sebesar 4,88% saja (dilansir dari *bps.go.id*, diakses pada 6 Januari 2024).

Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur sehingga jumlah penduduk juga cukup banyak. Pada masa pandemi pula, jumlah penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 sebesar 5,76% meningkat pada tahun 2020 sebesar 9,79%, namun, di tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 9,68%, tahun 2022 sebesar 7,62% hingga pada tahun 2023 sudah mencapai 6,76% saja (dilansir dari *bps.go.id*, diakses pada Maret 2024). Berikut adalah jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya pada tahun 2019-2023.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2019	130,55
2020	145,67
2021	152,49
2022	138,21
2023	136,37

Sumber : <https://jatim.bps.go.id> , (diakses pada 6 Januari 2024)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, peningkatan penduduk miskin akibat Pandemi Covid-19 terjadi secara drastis. Selama dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 21,94 ribu jiwa. Namun, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya untuk mengurangi sehingga penurunan dapat terjadi pada tahun 2022 hingga saat ini dengan penurunan sebesar 16,12 ribu jiwa.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, telah melakukan berbagai upaya agar angka kemiskinan pasca pandemi Covid-19 menurun di Kota Surabaya. Berbagai program bantuan sosial telah diberikan oleh Pemkot Surabaya, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Beras PPKM 2021 dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Dinas Sosial Kota Surabaya, 2021).

Pemerintah Kota Surabaya bukan hanya memberikan bantuan sosial saja, melainkan juga memberikan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Program Padat Karya. Program Padat Karya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran di Kota Surabaya. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi juga menetapkan Hari Padat Karya pada 25 Maret sebagaimana tertulis pada laman berita berikut.

"Hari Padat Karya di Kota Surabaya, saya tetapkan sejak tanggal 25 Maret 2022. Saya nyuwun (minta) dukungan semua warga Kota Surabaya. Kita kuatkan, kita rentangkan kekuatan bersama, saya yakin tahun 2022 kalau

kita bisa memanfaatkan semua lahan yang ada, maka kita bisa menghilangkan pengangguran," kata Walikota Surabaya.

Sumber : <https://www.surabaya.go.id/>, (diakses pada 6 Januari 2024)

Pemkot Surabaya melaksanakan program padat karya dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi pemerintah. Pemkot Surabaya telah memberikan fasilitas untuk program ini salah satunya tempat atau aset yang digunakan merupakan lahan milik pemerintah berasal dari lahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Lahan yang telah lama tidak digunakan dioptimalkan untuk masyarakat miskin dengan kegiatan padat karya. Pada program padat karya ini, keluarga miskin (gamis) yang mengikuti program tergabung melalui Rumah Padat Karya (RPK) di beberapa kecamatan Kota Surabaya. Rumah Padat Karya (RPK) yang sudah tersebar cukup luas di Kota Surabaya diharapkan dapat dikembangkan dan dikelola guna meningkatkan penghasilan hidup sehari-hari bagi keluarga miskin (gamis).

Salah satu padat karya yang dijalankan oleh Pemkot Surabaya adalah program Pembuatan Paving *Block* yakni “Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan)” yang dinaungi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya dan berkolaborasi dengan beberapa lintas sektor dalam pengimplementasiannya. Para keluarga miskin yang mengikuti kegiatan padat karya ini diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya.

Gambar 1.1 Pelatihan Padat Karya Paving GePREK di Kota Surabaya



Sumber : <https://www.surabaya.go.id>, (diakses pada 10 Januari 2024)

Pada gambar 1.1, pelatihan diberikan mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan paving serta mengoperasikan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan paving. Pelatihan tersebut diikuti oleh beberapa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sebagian kecamatan Kota Surabaya. Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan keterampilan sehingga ke depannya dapat mengembangkan perekonomian.

Padat Karya Paving *GEPREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan) ini menggalakkan semangat gotong royong dimana sesuai dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 yang berbunyi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Selain itu, pada peraturan tersebut juga selaras juga dengan visi Kota Surabaya tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Gotong Royong

Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”. Juga, penyelenggaraan Padat Karya Paving Geprek dengan prinsip pemberdayaan dimana melibatkan masyarakat terutama keluarga miskin (gamis). Prinsip Ekonomi Kerakyatan pada Padat Karya Paving *GePREK* ini dilakukan karena menjadi salah satu arah kebijakan ekonomi Kota Surabaya yang tertuang di Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dilakukan melalui program padat karya guna memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai segmen yang merasakan akibat dari pandemi Covid-19, peningkatan bidang pariwisata melalui pengembangan obyek potensial wisata dan penataan kawasan pariwisata yang terintegasi guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Surabaya serta mendorong kenaikan UMKM untuk berdaya saing melalui pemberdayaan sebagai penggerak utama perekonomian kota Surabaya.

Hasil wawancara awal penulis dengan salah satu pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Program Padat Karya Paving *GePREK* ini menggunakan fasilitas lahan kosong milik Pemkot Surabaya. Pembangunan Rumah Padat Karya (RPK) Paving ini dilakukan bertahap dan menyesuaikan potensi wilayah setempat. Berikut daftar kelompok usaha yang melaksanakan Padat Karya Paving *GePREK* di Kota Surabaya.

Tabel 1.3 Daftar Persebaran Kelompok Usaha Padat Karya *Paving GePREK* di Kota Surabaya berdasarkan lokasi Rumah Padat Karya (RPK)

No	Nama Kelompok Usaha	Jumlah Pekerja (orang)	Kecamatan
1	Tambaksari Maju Jaya	3	Tambaksari

2	Tambaksari Bersama Sejahtera	3	
3	Ploso Dukuh Setro (PDS) Jaya	4	Sukolilo
4	Tambaksari Jaya Sentosa	5	
5	Tambaksari Karya Sejahtera	4	Mulyorejo
6	Kusumo Jaya	3	
7	Kenjeran Jaya	3	Kenjeran
8	Takal Muda Kenjeran	4	
9	Takal Semangat Kenjeran	4	
10	Pakal Sukses Bersama	4	Pakal
11	Benowo Maju Jaya	4	Benowo
12	Gubeng Jaya Abadi	4	Gubeng
13	Gubeng Berkah	4	
14	Siwalankerto Berkah	3	Wonocolo
15	Jemur Berkah	5	
16	Gunung Anyar Sejahtera	4	Gunung Anyar
17	Barokah Gunung Anyar	3	
18	Sukomanunggal Makmur	3	Wonokromo
19	Tambaksari Sentosa	4	
20	Gunungsari Sejahtera	4	
21	Gunungsari Lancar Jaya	4	
Total		79	

Sumber : Data diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa selama pelaksanaan padat karya ini, dari 31 kecamatan di Kota Surabaya, 10 kecamatan yang sudah mempunyai Rumah Padat Karya Paving dan setiap kecamatan dapat memiliki kelompok usaha lebih dari 1 dengan jumlah 1 kelompok usaha paling sedikit berisi 3 anggota.

Program Padat Karya Paving *GEPREK* ini merupakan inovasi baru yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya. Selama satu tahun berjalan, program ini telah memperoleh prestasi. Inovasi ini telah mendapat apresiasi dengan Juara 1 Lomba Inovasi Surabaya (Inovboyo) Tahun 2023 tingkat Perangkat Daerah (dilansir dari *inovasi.surabaya.go.id*)

Program Padat Karya Paving *GEPREK* yang dinaungi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya ini juga berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS). Lembaga Pendidikan ini dalam program padat karya pembuatan paving adalah sebagai penguji kelayakan paving yang berada di Laboratorium ITS sebagaimana artikel berikut :

“Paving-paving itu digunakan untuk program perbaikan jalan di perkampungan. Karena berurusan dengan anggaran negara, kualitasnya harus bagus. DSDABM pun menggandeng ITS untuk melakukan *quality control* itu. Hasilnya memang di luar dugaan. Awalnya kami pasang target kualitas paving adalah K175. Namun, setelah dites, ternyata K300. Artinya, dilindas kendaraan besar pun masih kuat”. kata Kabid Jalan dan Jembatan DSDABM, Adi Gunita.

Sumber : <https://www.jawapos.com> (diakses pada 6 Januari 2024).

Berdasarkan berita tersebut, para pekerja telah cukup mampu menghasilkan paving dengan kualitas baik diatas target yang telah ditentukan. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan fasilitas baik modal, legalitas dan lahan dari aset Pemerintah untuk program ini. Terkait modal, para warga miskin sebagai pekerja tidak perlu khawatir karena semua telah diberikan oleh Pemkot Surabaya, seperti penyampaian Bapak Adi Gunita selaku Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya yang tertulis pada artikel berikut :

“Selain legalitas, Adi menyebut, bahwa pemkot juga membantu memfasilitasi kelompok usaha padat karya paving agar mendapat bantuan permodalan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama. Setiap kelompok yang terdiri dari enam orang itu pun mendapatkan bantuan permodalan Rp15 juta untuk usaha produksi paving. Adi juga menerangkan, bahwa modal yang berasal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama ini digunakan oleh kelompok padat karya untuk membeli bahan pembuatan paving. Lalu, untuk alat disediakan oleh Pemkot Surabaya hasil *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara untuk tempat produksinya, mereka menggunakan lahan aset milik Pemkot Surabaya.”

Sumber : <https://www.surabaya.go.id> (diakses pada 6 Januari 2024).

Namun, pada program padat karya ini masih terdapat kendala selama dilaksanakan hingga saat ini. Salah satu kecamatan mengalami masalah seperti pembelian paving sebagai upah pekerja telat dibayarkan. Hal tersebut seperti penjelasan salah satu pekerja di RPK Kenjeran Barokah melalui artikel berikut.

“Terdesak, agar produksi tetap berjalan, kami meminjam uang kepada kelompok RPK Paving Kecamatan Tambaksari,” ungkapnya.
Sumber : <https://www.jawapos.com> (diakses pada 6 Januari 2024)

Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya pada artikel tersebut juga menjelaskan jika hal tersebut terjadi karena arus kas tidak berjalan maksimal. Beliau juga menjelaskan jika para pekerja terkadang harus patungan untuk menutupi biaya operasional sehingga tunggakan listrik tidak terjadi.

Selain itu, masalah yang terjadi di kecamatan lain adalah minimnya pekerja di RPK Paving seperti di Siwalankerto seperti penjelasan Ketua RW 06 Kelurahan Siwalankerto, Muhammad Aly dalam artikel di bawah ini.

“Sebenarnya, idealnya satu mesin dipegang enam orang. Namun, kami kekurangan pekerja. Jadi, sementara dipegang lima orang. Sebenarnya, banyak warga yang menanyakan pekerjaan di sini. Namun, karena syaratnya dari gakin, jadi banyak kandidat yang tidak lolos,” ujarnya.
Sumber : <https://www.jawapos.com/>, (diakses pada 7 Januari 2024)

Berdasarkan hal tersebut, minat masyarakat terutama dari keluarga miskin juga terlihat pada wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir. Salah satu keluarga miskin, M. Bahri Anwar, yang sedang menganggur diberikan pekerjaan melalui padat karya sebagaimana pada artikel berita berikut.

“Bahagia dan senang, saya dan ibu tidak menyangka karena mulai besok (Rabu, 31/5/2023) saya bersama adik diajak Pak Walikota (Eri Cahyadi) untuk bekerja membuat paving, terima kasih Pak Eri,” ujar M. Bahri Anwar.
Sumber : <https://surabaya.go.id/>, (diakses pada 7 Januari 2024)

Pemkot Surabaya telah berupaya dengan membuat Program Padat Karya Paving *GEPREK* untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. Setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan suatu lembaga, memiliki tujuan yang akan dicapai. Salah satu unsur utama guna mencapai tujuan atau target yang ditetapkan dalam setiap organisasi merupakan konsep efektivitas. Sebagaimana menurut Komaruddin (1984) sebagaimana dikutip (Mutiarin & Zaenuddin, 2021) efektivitas didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mencerminkan seberapa jauh kegiatan manajemen berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Terkait program padat karya di Kota Surabaya, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya, namun belum ada penelitian membahas mengenai padat karya Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mutiara dan Ananta (2023) yang menyimpulkan hasil penelitian tujuan pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal melalui Rumah Padat Karya *Viaduct* by Gubeng di Kota Surabaya dimana 2 dari 9 tujuan pemberdayaan masyarakat menurut teori Mardikanto masih belum terpenuhi, yakni perbaikan lingkungan dan perbaikan kehidupan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Fadhilah dan Wahyudi (2023) mendapatkan hasil penelitian yakni pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Rumah Padat Karya Dukuh Sutorejo sudah mampu dinilai berjalan dengan baik. Namun, masih perlu meningkatkan kegiatan pembinaan dan pelatihan secara komprehensif diperuntukkan pekerja serta upaya perlindungan yang lebih intensif untuk memudahkan pekerja dalam mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dari

pemerintah. Penelitian juga dilakukan oleh Frizky dan Lukman (2023) dengan hasil penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Padat Karya Krembangan telah tercapai dan berjalan dengan cukup baik pada beberapa fokus penelitian sehingga dapat dikatakan mampu menciptakan masyarakat yang berdaya.

Berdasarkan data dan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian terhadap program padat karya yang diinisiasi Pemerintah Kota Surabaya untuk keluarga miskin (gamis) dengan memfokuskan penelitian di seluruh Rumah Padat Karya Paving di Kota Surabaya dengan program Padat Karya Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan) guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program padat karya ini. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Keberhasilan Program Padat Karya Paving *GEPREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan) bagi Keluarga Miskin di Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan mengenai Bagaimana Tingkat Keberhasilan Program Padat Karya Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan, Dan Ekonomi Kerakyatan) bagi Keluarga Miskin di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk mengukur Tingkat keberhasilan Program Padat Karya Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan, Dan Ekonomi Kerakyatan) bagi Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan tersebut, maka riset yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan pembandingan dengan penelitian selanjutnya di prodi Administrasi Publik terutama terkait program padat karya Paving *GEPREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan) bagi Keluarga Miskin di Kota Surabaya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini sebagai acuan akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa maupun akademisi instansi dan sarana pendidikan dimana dapat dijadikan literatur maupun pembandingan bagi penelitian selanjutnya atau di masa yang akan datang yang serumpun dengan riset saat ini.

2) Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan serta sumbangan masukan untuk pengembangan program padat karya Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan, Dan Ekonomi Kerakyatan) yang sedang berjalan bagi keluarga miskin agar meningkatkan kesejahteraan warga miskin, khususnya di Kota Surabaya.

3) Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi peneliti adalah guna syarat kelulusan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan memberikan wawasan yang lebih dalam melalui penelitian terkait Program Padat Karya Paving *GePREK* (Gotong Royong, Pemberdayaan, Dan Ekonomi Kerakyatan) bagi Keluarga Miskin di Kota Surabaya.